

## ANALISIS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN DI KABUPATEN MALUKU TENGAH

Achmad Zaky Marasabessy<sup>1</sup> dan Najamuddin<sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Darussalam Ambon.

<sup>2)</sup> Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar

Email : [achmadz\\_m67@yahoo.co.id](mailto:achmadz_m67@yahoo.co.id)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Melihat tata kelola sumberdaya perikanan tangkap di Kabupaten Maluku Tengah. Mendesain Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya perikanan tangkap di Kabupaten Maluku Tengah. Hasil penelitian menunjukkan desain kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku tengah menunjukkan adanya keterkaitan antara pihak pengambil kebijakan dalam hal ini Pemerintah (*collective chois level*) dengan lembaga pelaksana kebijakan yang (*Operasional Choise Level*). Aktor-aktor yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah adalah Departemen Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah, Lembaga Masyarakat yang tergabung dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Masyarakat Nelayan, Kelompok pengusaha dan pedagang pengumpul / papalele dan serta polisi perairan dan Angkatan laut.

**Kata Kunci:** Kelembagaan, Sumberdaya, Perikanan.

### Abstract

*The purpose of this study is Seeing governance of fisheries resources in Central Maluku district. Designing Institutional Resources Management of fisheries in Central Maluku district. The results showed institutional design management of fishery resources in the District of central Maluku district Leihitu shows the relationship between the policy makers in this case the Government (chois collective level) with implementing agencies policies (Operational Level choise). Actors who are involved directly in the management of fishery resources in the District Leihitu Central Maluku district is the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, Marine and Fisheries Agency of Maluku Province, Department of Marine and Fisheries Central Maluku District, Public Agencies that are members of the Development Planning Society Fishermen, Group businessmen and traders / papalele and as well as the water police and navy.*

**Keywords:** *Institutions, Resources, Fisheries.*

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negeri bahari dengan potensi sumberdaya perikanan yang sangat besar. Dengan karakteristik kelautan tropika, maka salah satu sektor andalan sumberdaya kalautan adalah sektor perikanan. Menurut Kusumastanto (2006), karakteristik laut negara-negara tropis dicirikan dengan jumlah kandungan sumberdaya perikanan yang terdiri dari berbagai macam spesies ikan lebih besar

jika dibandingkan dengan negara-negara sub tropis, hal ini disebabkan karena laut tropika mempunyai ciri ekosistem pendukung berupa terumbu karang, padang lamun dan mangrove sebagai tempat berkembang biaknya berbagai jenis spesies ikan. Kondisi ini, secara ekonomi menguntungkan bagi Indonesia karena sektor perikanan dapat dijadikan sebagai salah satu ujung tombak bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia selama ini lebih ditujukan untuk meningkatkan jumlah produksi perikanan dengan mendaya-gunakan masyarakat nelayan, baik nelayan skala besar seperti nelayan industri maupun nelayan skala kecil yang terdiri dari nelayan tradisional. Kondisi ini dibuktikan dengan tingginya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional.

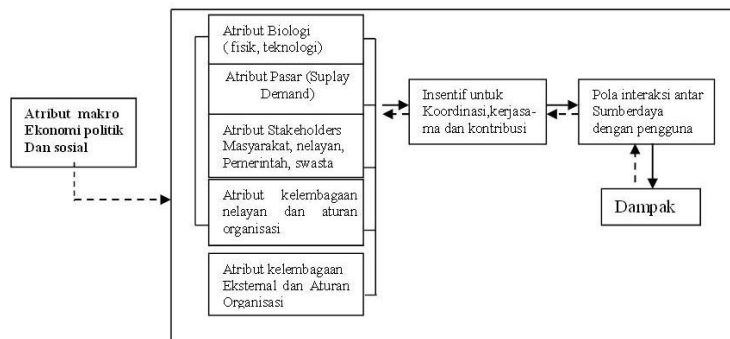
Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan, peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor kelautan dan perikanan terhadap PDB nasional non-migas selama tahun 2006-2008 mencapai pertumbuhan rata-rata 37,06 persen. Kontribusi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan sektor-sektor lain seperti pertanian, peternakan, serta kehutanan. Bahkan, kontribusi sektor perikanan terhadap PDB nasional yang semula di bawah 1,0 persen kini telah menjadi 10 persen.

Tingginya kontribusi sektor perikanan terhadap PDB Nasional, tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, khususnya nelayan tradisional. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya nelayan tradisional yang hidup di bawah garis kemiskinan hampir diseluruh wilayah Indonesia. Menurut Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPP HNSI, 2008), sedikitnya 14,58 juta atau sekitar 90% dari 16,2 juta jumlah nelayan di Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan.

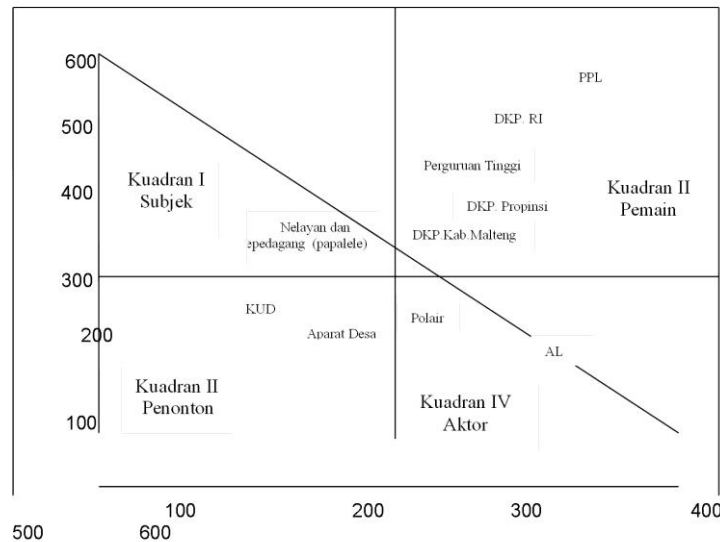
Implementasi kebijakan pengelolaan perikanan di kabupaten Maluku Tengah terkait dengan sejumlah lembaga pemerintah dan non pemerintah maupun stakeholder untuk mengimplementasikan sejumlah kebijakan yang telah di canangkan dalam program peningkatan kesejahteraan nelayan. Dengan demikian maka sampai sejauh mana peranan lembaga-lembaga dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap, di Kabupaten Maluku Tengah merupakan permasalahan yang di analisis dalam penelitian ini.

## 2. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Survey dengan mengambil lokasi di Kabupaten Maluku Tengah. Subjek penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Dalam studi kasus, metode yang digunakan bersifat multi metode, karena dirancang untuk menunjukkan suatu masalah secara terperinci dari sudut pandang peneliti dengan menggunakan berbagai sumber data (Blaxter *et al.* 2006). Hasil dari penelitian kasus merupakan suatu generalisasi dari pola-pola kasus yang tipikal dari individu, kelompok, lembaga dan sebagainya, baik dengan penekanan terhadap faktor-faktor kasus tertentu atau keseluruhan faktor-faktor dan fenomena-fenomena. Studi kasus lebih menekankan pada mengkaji variabel yang cukup banyak pada jumlah unit yang kecil. (Nazir 1988)



Gambar 1. Kerangka Analisis Kelembagaan (Pido *et.al* 1979).



Gambar 2. Pemetaan Aktor Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya perikanan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Aktor Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Hasil pemetaan aktor berdasarkan derajat kepentingan dan pengaruhnya didalam pemanfatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan Kecamatan Leihitu, pada gambar 6.

Kuadran I (Subjek) ditempati oleh para nelayan dan pedagang pengumpul (papalele) sumberdaya ikan. Kelompok ini memiliki kepentingan tinggi terhadap keberadaan hasil tangkapan sumberdaya perikanan, namun tidak terkait dalam merumuskan berbagai kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan. Ketergantungan tinggi disini terkait dengan proses hasil tangkapan dan pemasaran hasil produksi perikanan. Selama ini hasil tangkapan oleh nelayan biasanya disalurkan kepada pihak pedagang pengumpul (papalele) untuk kemudian di jual oleh pedagang pengumpul tersebut ke pasar, baik dalam bentuk ikan mentah, maupun dalam bentuk ikan yang telah di asap yang dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama ikan asar.

Kuadran II ( Pemain ) ditempati oleh Dinas Kelautan dan Perikanan RI, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah, Perguruan tinggi, Kelompok ini mempunyai

tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan di Kabupaten Maluku Tengah mel alui perumusan berbagai peraturan, baik formal maupun informal.

Kuadran III (Penonton) ditempati oleh aparat desa dan perbankan. Keberadaan mereka dinilai tidak telalu tergantung terhadap sumberdaya perikanan dan juga tidak terlalu berpengaruh terhadap pemanfaatan sumberdaya perikanan. Aparat desa mempunyai fleksibilitas yang tinggi dalam mencari sumber perekonomian desa selain kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan di Kecamatan Leihitu. Pihak perbankan juga mempunyai fleksibilitas yang tinggi dalam mengembangkan aktifitas usahanya sehingga tidak tergantung kepada keberadaan sumberdaya perikanan di wilayah perairan Kecamatan Laihitu Kabupaten Maluku Tengah.

#### Tata Kelola Pengelolaan Sumberdaya Perikanan.

Model tata kelola kelembagaan sumberdaya perikanan tangkap dalam penelitian ini mengacu pada kerangka analisis kelembagaan yang dikembangkan oleh Pido et al (1979), yang membagi tata kelola sumberdaya perikanan kedalam beberapa beberapa atribut yaitu 1). atribut biofisik dan teknologi, 2) atribut pasar, 3)

atribut pemegang kepentingan, 4) atribut tatanan dan indikator pengambilan keputusan 5) atribut kelembagaan dan organisasi eksternal dan 6). Atribut eksogen. Hasil analisis mengenai tata kelola sumberdaya perikanan di kabupaten Maluku tengah khususnya di kecamatan Leihitu, terdiri dari berbagai atribut yang saling mempengaruhi dalam pola interaksi antara yang satu dengan. Atribut-atribut tersebut antara lain :

Pertama, atribut biofisik dan teknologi. Atribut biofisik adalah kandungan sumberdaya perikanan tangkap di wilayah perairan Kabupaten Maluku Tengah. Kandungan sumberdaya perikanan yang dimiliki masih tergolong baik dan dalam kondisi alami, dengan berbagai species ikan yang masih cukup melimpah, Potensi sumberdaya perikanan di kabupaten Maluku Tengah khususnya perikanan tangkap adalah 484.532 ton /tahun dan yang baru dimanfaatkan adalah sebesar 41.3007,1 ton / tahun, hal ini didukung oleh luas wilayah laut yang mencakup 136.116,1 Km<sup>2</sup>. Sedangkan atribut teknologi adalah jenis teknologi alat tangkap yang selama ini digunakan oleh nelayan tradisional yang ada di wilayah Kecamatan Leihitu. Teknologi alat tangkap yang dimiliki oleh nelayan berbeda- beda disesuaikan dengan besarnya armada tangkap yang dimiliki oleh nelayan. Jenis alat tangkap yang selama ini digunakan oleh nelayan tradisional antara lain. Untuk nelayan formal terdiri dari perahu yang hanya dapat dioperasikan oleh 2 sampai 3 orang dengan motor penggerak adalah mesin ketinting, dan alat tangkap yang digunakan adalah berupa tali pancing dan kail (*Long hand*), jaring ukuran 2,5 inci. Sedangkan untuk nelayan informal perahu yang digunakan, dapat dioperasikan oleh 10-12 orang dengan alat tangkap pancing tonda maupun jaring yang berukuran besar. Motor penggerak yang digunakan adalah jenis mesin Yamaha berukuran 40 PK. Disamping itu ada juga yang masih menggunakan perahu dengan dayung sebagai penggerak.

Kedua, atribut pasar yang elemen utamanya adalah meliputi aspek permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Di kecamatan Leihitu atribut ini terdiri atas pasar lokal dimana hasil tangkapan langsung dipasarkan oleh nelayan atau pedagang pengumpul, dimana pasar lokal

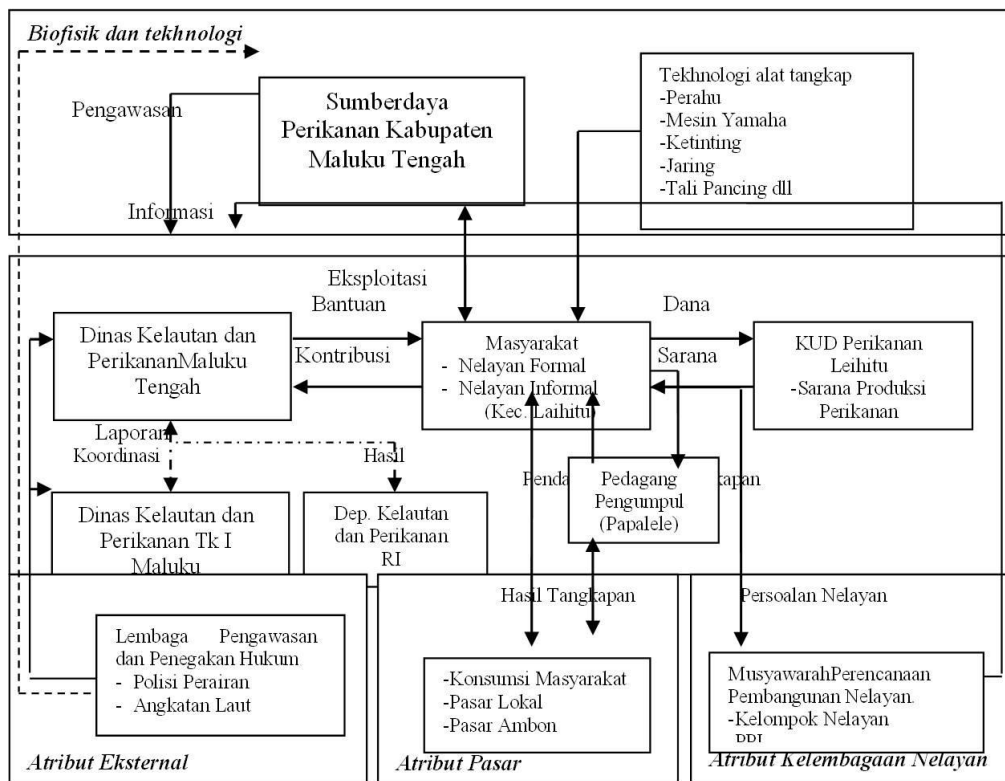
yang menjadi pusat perdagangan hasil tangkapan di Kecamatan Leihitu bertempat di Desa Hitu Lama. Kondisi ini tergantung dari jumlah hasil tangkapan. Semakin besar hasil tangkapan, maka hasil produksi akan dipasarkan di pasar yang lebih besar yaitu pasar yang terdapat di kota Ambon, hal ini disebabkan karena jumlah konsumen yang lebih besar jika dibandingkan dengan pasar lokal. Disamping itu ada juga kelompok masyarakat lokal pengguna sumberdaya perikanan tangkap, biasanya mereka adalah komoditas yang mengkonsumsi langsung, dengan cara membeli dari nelayan ketika nelayan baru pulang setelah menangkap ikan.

Ketiga, atribut Pemegang kepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan. Di Kecamatan Leihitu mereka ini terdiri dari kelompok- kelompok nelayan, baik nelayan formal yang terdiri atas kelompok-kelompok nelayan yang diakui keberadaannya oleh pemerintah. maupun informal yang keberadaannya tidak diketahui oleh pemerintah. Disamping itu ada juga pemerintah selaku pembuat kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan perikanan apakah itu ditingkat Propinsi Maluku ataupun ditingkat Kabupaten Maluku tengah. Kelompok swasta yang termasuk dalam atribut ini adalah para pedagang pengumpul (*papalele*) mereka ini, secara sosial ekonomi memiliki kepentingan terhadap sumberdaya perikanan dimana mereka adalah pembeli langsung hasil tangkapan dari nelayan untuk dipasarkan. Hal ini disebabkan adanya ketergantungan hidup dari hasil penjualan ikan oleh mereka.

Kempat, atribut pengambilan keputusan. atribut ini pada tingkat nelayan di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dikenal sebagai suatu lembaga musyawarah yang bertujuan untuk mengambil keputusan, terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi di tingkat nelayan. Lembaga ini dikenal dengan lembaga “Musyawarah Perencanaan Pembangunan” (*Musrembang*). Lembaga tersebut dibentuk oleh masyarakat nelayan dan keanggotaannya terdiri dari kelompok masyarakat nelayan yang dikoordinir oleh penyuluh perikanan lapangan (PPL) yang ada di

tingkat kecamatan Laihitu. Hasil keputusan musyawarah biasanya akan dikoordinasikan kepada dinas kelautan dan perikanan yang ada di tingkat kabupaten. Atribut lainnya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum ini dilakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam cara-cara melakukan eksploitasi sumberdaya perikanan tangkap. Di tingkat Kabupaten Maluku Tengah, terdapat pemberlakuan pelarangan terhadap *illegal fishing*, penangkapan dengan menggunakan potasium dan maupun bom ikan. Biasanya bagi mereka yang melanggar aturan ini akan dikenai sanksi. Aparat penegak hukum yang dilibatkan sebagai pengawasan dalam mengantisipasi terjadinya tindak pidana kejahatan sesuai dengan

larangan yang diberlakukan adalah pihak Angkatan Laut dan Polisi perairan wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Kelima, atribut kelembagaan eksternal dan organisasi eksternal. Mereka yang terlibat di dalam atribut ini adalah mereka yang tidak mempunyai akses langsung terhadap terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan, tapi masih berpengaruh terhadap kehidupan nelayan dan kondisi sumberdaya perikanan. Di Kecamatan Laihitu mereka adalah Aparatur desa dan pihak bank. Untuk melihat tata kelola sumberdaya perikanan berdasarkan atribut dan interaksi antar atribut dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Tata Kelola Sumberdaya Perikanan Tangkap di Kecamatan Laihitu

Dari gambar 3, terlihat bahwa tiap-tiap aktor yang ada pada masing-masing atribut

mempunyai peranan dan saling adanya keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.



Keterkaitan ini terlihat dengan adanya interaksi antar masing-masing aktor didalam atribut itu sendiri, maupun adanya interaksi antara aktor diantara satu atribut dengan atribut lainnya. Dari seluruh atribut yang ada, pada aktor masyarakat nelayan merupakan aktor yang dapat menghubungkan dengan berbagai aktor yang ada dalam pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap di Kecamatan Leihitu, hal ini mengingat pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap tersebut ditujukan kepada penyelesaian masalah-masalah nelayan dan berkaitan dengan eksploitasi sumberdaya perikanan yang ada. Atribut ini kemudian berhubungan dengan penggunaan teknologi alat tangkap yang digunakan dengan nelayan adalah sebagai pengguna. Semakin baik teknologi yang digunakan akan semakin berpengaruh terhadap hasil tangkapan, meningkatnya hasil tangkapan apabila didukung oleh kondisi pasar yang memadai, maka akan berdampak kepada meningkatnya pendapatan nelayan.

Disamping itu eksploitasi sumberdaya perikanan akan berdampak kepada kondisi sumberdaya perikanan itu sendiri, maka harus ada aturan-aturan dari lembaga berwenang dalam hal ini pihak pemerintah untuk melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggarn yang dilakukan dalam mengeksploitasi sumberdaya perikanan. Untuk itu dalam atribut eksternal terdapat aktor yang yang bertugas mengawasi sumberdaya kelautan sehingga dalam melakukan eksploitasi oleh pihak pengguna, tidak menyalahi aturan yang berampak kepada kerusakan sumberdaya perikanan. Mereka ini adalah polisi perairan dan angkatan laut, yang bertugas untuk menjaga agar tidak terjadi eksploitasi yang keluar dari tata aturan yang telah ditetapkan dan disepakati. Tindak pelanggaran yang kemudian akan dilaporkan kepada instansi terkait yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Maluku Tengah maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku untuk diketahui dan ditindak lanjuti. Atribut lainnya adalah kelembagaan nelayan yang biasanya digunakan untuk

bermusyawarah terkait persoalan yang dihadapi oleh nelayan, kemudian mencari solusi pemecahannya. Mereka adalah kelompok nelayan yang dalam kaitannya dengan pemerintah adalah melakukan koordinasi dan memberikan informasi kepada pemerintah mengenai persoalan yang dihadapi, sehingga diharapkan ada campur tangan pemerintah untuk turut mengatasinya.

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

Desain Kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku tengah menunjukkan adanya keterkaitan antara pihak pengambil kebijakan dalam hal ini Pemerintah (*collective choise level*) dengan lembaga pelaksana kebijakan yang (*Operasional Choise Level*). Aktor-aktor yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah adalah Departemen Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah, Lembaga Masyarakat yang tergabung dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Masyarakat Nelayan, Kelompok pengusaha dan pedagang pengumpul / papalele dan serta polisi perairan dan Angkatan laut. Sehingga disarankan adanya kebijakan pemerintah yang mengatur tentang aktifitas penangkapan dilaut, mengingat pada kondisi optimal hasil produksi telah melampaui batas kapasitas ketersediaan ikan. Dengan demikian, maka strategis kebijakan itu harus mengacu kepada pengurangan *effort/* upaya tangkap.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Blaxter L.*et al.* 2001. *How to Reseach*. Second Edition. Open University Press.
- Kusumastanto, T. 2003. *Ocean Policy* Dalam Mambangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kusumastanto, T. 2006. *Ekonomi Kelautan (Ocean Economics-Oceanomics)*.PKSPL-IPB.



Nazir M. 1988. Metode Penelitian. Penerbit  
Ghalia Indonesia Jakarta  
Pido *et.al.* 1997, A. Rafid *Aprisial Aproach to  
evaluation of Community-Level Fisheries  
Management System Framework and*

*Field Application at Selected Coastal  
Fishing Vilage in the Philippines and  
Indonesia.*